



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 1315-1326

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kelurahan Leato Utara, Kota Gorontalo

¹Delan Abdullah, ²Rahmatiah

^{1,2}Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo

¹delanabdullah7@gmail.com, ²rahmatiah@ung.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bentuk, tingkat, serta faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kelurahan Leato Utara, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo. Permasalahan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah, masih menjadi tantangan serius akibat meningkatnya aktivitas masyarakat, rendahnya kesadaran individu, keterbatasan sarana dan prasarana, serta lemahnya pengawasan dan penegakan aturan di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam terhadap 35 informan yang dipilih secara purposive, serta dokumentasi sebagai data pendukung. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, sedangkan analisis data dilakukan secara berkelanjutan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup umumnya terwujud dalam bentuk tenaga melalui kegiatan gotong royong, partisipasi ide melalui penyampaian aspirasi dalam forum RT/RW dan rapat kelurahan, serta partisipasi pengawasan yang bersifat informal melalui kontrol sosial antarwarga. Namun, partisipasi tersebut masih cenderung bersifat reaktif dan belum merata, karena sebagian besar warga baru terlibat ketika terdapat arahan pemerintah kelurahan atau muncul persoalan lingkungan yang mendesak. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan peran struktural pemerintah, peningkatan ketersediaan sarana prasarana, serta pengembangan strategi pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berbasis partisipasi untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Lingkungan Hidup, Leato Utara

1. Latar Belakang

Kerusakan lingkungan hidup menjadi persoalan global yang semakin mengkhawatirkan, terutama akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Berbagai bentuk pencemaran mulai dari udara, air, hingga tanah serta degradasi lahan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan krisis energi terus meningkat dan berpuncak pada pemanasan global (Gunawan, 2020). Dalam konteks regulasi, (Undang-Undang Republik Indonesia, 1997) menegaskan bahwa perusakan lingkungan adalah tindakan yang mengubah kondisi fisik atau hayati sehingga lingkungan tidak mampu menjalankan fungsinya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan pun menjadi ancaman yang berulang dari waktu ke waktu.

Salah satu isu terbesar dalam kerusakan lingkungan adalah meningkatnya timbunan sampah. Volume sampah terus bertambah seiring pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan pembuangan, sehingga pengelolaannya menjadi persoalan mendesak. (Undang-undang Republik Indonesia No 18, 2008) mendefinisikan sampah sebagai sisa aktivitas manusia atau proses alam yang berbentuk padat, serta menekankan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan. Berbagai penelitian mendukung kondisi tersebut, seperti (Rosa et al., 2022) yang menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi mendorong kenaikan produksi dan keberagaman karakter sampah, serta (Setyaningsih & Maesaroh, 2021) yang menemukan bahwa penambahan penduduk berbanding lurus dengan volume sampah yang dihasilkan.

Situasi serupa terjadi di Indonesia, di mana sistem pengelolaan sampah masih menghadapi tantangan besar. Menurut data KLHK dalam (Nizar et al., 2025), Indonesia menghasilkan sekitar 6,8 juta ton sampah plastik per tahun dan lebih dari 60% tidak didaur ulang. Bahkan, sampah plastik diproyeksikan mencapai 13,98% dari total timbunan sampah nasional, dengan volume sekitar 9,9 juta ton. Kondisi ini dipicu keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, rendahnya kesadaran masyarakat, serta pola konsumsi plastik sekali pakai

yang masih tinggi. Di tingkat lokal, (Ngareng et al., 2024) mencatat bahwa Kota Gorontalo mengalami peningkatan jumlah sampah seiring pertumbuhan ekonomi dan aktivitas masyarakat, yang jika tidak ditangani dapat menjadi sumber penyakit, merusak estetika, dan menurunkan kualitas lingkungan.

Dalam konteks tata kelola, hukum lingkungan menjadi instrumen penting yang mengatur perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Namun implementasi kebijakan di tingkat masyarakat masih menghadapi berbagai kendala. Partisipasi masyarakat memegang peranan besar terhadap kualitas lingkungan karena setiap komponen dalam lingkungan saling berkaitan dan membutuhkan sinergi untuk berfungsi secara optimal (Yasril & Nur, 2018). Pada tingkat kelurahan, khususnya wilayah padat penduduk seperti Kelurahan Leato Utara, tantangan tersebut semakin kompleks karena kesadaran masyarakat, faktor sosial, dan kondisi ekonomi turut memengaruhi efektivitas pengelolaan lingkungan.

Hasil observasi awal di Kelurahan Leato Utara menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan masih rendah. Sebagian warga merasa enggan terlibat karena kurangnya kesadaran akan pentingnya konservasi lingkungan dan tekanan ekonomi yang membuat perhatian mereka terfokus pada kebutuhan sehari-hari. Temuan ini sejalan dengan penelitian Demmanggasa, (2024) yang menjelaskan bahwa kondisi sosial ekonomi menjadi hambatan signifikan dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam program pengelolaan lingkungan. Masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas cenderung menempatkan isu lingkungan sebagai prioritas jangka panjang yang kurang mendesak sehingga partisipasi dalam konservasi menjadi rendah.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami lebih dalam bagaimana pola partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kelurahan Leato Utara, apa saja faktor penghambatnya, serta bagaimana strategi pemberdayaan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus mengajukan pertanyaan mengenai bentuk, tingkat, serta kendala partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kelurahan Leato Utara Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di Kelurahan Leato Utara, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan tiga puluh lima informan terpilih menggunakan teknik purposive sampling, serta dokumentasi untuk memperkuat temuan. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam seluruh proses penelitian mulai dari pengamatan, interaksi dengan informan, hingga pencatatan data. Sumber data terdiri dari data primer berupa hasil wawancara dengan pemerintah kelurahan, masyarakat, dan Dinas Lingkungan Hidup, serta data sekunder berupa dokumen dan arsip terkait. Wawancara dilakukan berdasarkan pedoman yang telah disusun agar proses pengumpulan data tetap sistematis, sementara observasi dan dokumentasi melengkapi serta memvalidasi hasil temuan (Sugiyono, 2018).

Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan informasi dari hasil observasi, wawancara, dan dokumen. Analisis data dilakukan secara berkesinambungan mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan agar pola temuan dapat disusun secara logis dan menjawab fokus penelitian. Hasil akhir disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang menggambarkan fenomena secara mendalam dan akurat sesuai kondisi lapangan.

3. Hasil dan Diskusi

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tingkat Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kelurahan Leato Utara secara umum menunjukkan adanya kesadaran yang cukup baik terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Masyarakat di wilayah ini umumnya turut serta dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti, penanaman pohon, maupun pembersihan lingkungan yang diselenggarakan oleh pihak kelurahan. Kegiatan-kegiatan tersebut mencerminkan adanya semangat gotong royong dan tanggung jawab sosial dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Namun demikian, kesadaran masyarakat tersebut belum merata di seluruh lapisan warga. Masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan, terutama dalam hal pengelolaan sampah rumah tangga. Beberapa warga masih memiliki kebiasaan membuang sampah di tempat yang tidak semestinya, seperti di pesisir pantai dan saluran air (drainase). Kebiasaan ini menyebabkan lingkungan

menjadi kotor dan menimbulkan berbagai permasalahan, seperti tersumbatnya saluran air, bau tidak sedap, serta menurunnya estetika kawasan pesisir. Hal ini juga disampaikan oleh Ketua RW 01 :

“Kami sudah sering mengingatkan warga, tapi karena tempat sampah jauh, akhirnya ada juga yang buang sembarangan. Apalagi kesadaran masyarakat masih dibawah. Kalau sudah begitu, lingkungan jadi kotor lagi.”

Pandangan seperti ini menjadikan partisipasi masyarakat bersifat reaktif, di mana mereka baru terlibat apabila ada arahan atau ajakan dari pihak kelurahan dan hanya sebagian kecil warga saja yang melakukan partisipasi secara spontan. Ketua RW 01 juga menambahkan :

“Partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan cenderung meningkat ketika ada inisiatif atau arahan dari pihak kelurahan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan di Kelurahan Leato Utara menunjukkan bahwa sebagian warga telah memiliki kesadaran cukup baik melalui keterlibatan dalam kerja bakti, penanaman pohon, dan kegiatan pembersihan lingkungan. Namun, kesadaran tersebut belum merata, ditandai masih adanya warga yang membuang sampah di pesisir pantai maupun saluran air karena akses tempat sampah yang jauh. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ketua RW 01 yang menyebutkan bahwa “kami sudah sering mengingatkan warga, tapi karena tempat sampah jauh, akhirnya ada juga yang buang sembarangan,” menunjukkan bahwa perilaku masyarakat dipengaruhi oleh kondisi struktural berupa ketersediaan fasilitas persampahan. Fenomena seperti ini juga ditemukan oleh Maryani dan Darmawan (2017), yang menyatakan bahwa rendahnya kedekatan fasilitas lingkungan meningkatkan kecenderungan warga membuang sampah sembarangan.

Dalam perspektif Teori Struktural Fungsional, masyarakat dipahami sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan. Partisipasi warga dalam kegiatan kebersihan merupakan bentuk fungsi integrasi dan pemeliharaan pola sosial, yaitu menjaga norma kebersihan dan gotong royong. Namun, ketika sebagian warga tidak menjalankan peran tersebut, terjadi disfungsi sosial, di mana salah satu elemen dalam sistem tidak bekerja sebagaimana mestinya sehingga mengganggu fungsi lingkungan dan keharmonisan sosial. Hal ini relevan dengan temuan Lestari (2020), yang menjelaskan bahwa kegagalan sebagian anggota masyarakat dalam menjalankan peran lingkungan dapat menurunkan efektivitas sistem sosial secara keseluruhan.

Hasil wawancara yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat meningkat hanya ketika ada arahan kelurahan memperlihatkan bahwa keterlibatan warga masih bersifat reaktif, bukan kesadaran mandiri. Kondisi ini diperkuat oleh studi Marhayati (2019), yang menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan lingkungan akan meningkat apabila adanya dorongan dari pemimpin formal atau tokoh masyarakat. Demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan tidak dapat dilepaskan dari faktor struktural seperti fasilitas, peran pemerintah, serta kekuatan norma sosial yang bekerja dalam masyarakat, sebagaimana dijelaskan melalui kerangka Struktural Fungsional.

Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan

1. Partisipasi dalam Bentuk Tenaga (Gotong Royong)

Gotong royong merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang sering dijumpai di Kelurahan Leato Utara. Warga biasanya terlibat langsung dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan, memperbaiki saluran drainase, dan membersihkan pantai dari tumpukan sampah.

“Memang kalau kerja bakti terkait selokan atau sampah, biasanya yang datang lumayan banyak. Mereka sadar kalau tidak ikut, akibatnya mereka juga yang akan repot. Tapi ya tetap, tidak semua ikut, kurang lebih hanya sekitar 15 sampai 20 orang warga yang hadir. Partisipasi warga masih tergantung situasi. Kalau masalahnya mendesak, seperti banjir, biasanya cepat tanggap. Tapi kalau sifatnya pencegahan, kehadirannya menurun drastic. Warga yang datang biasanya orang-orang yang memang peduli dan punya waktu. Yang lain sering bilang ada kerjaan, atau malah tidak muncul tanpa alasan jelas. Saya lihat partisipasi ini seperti pola, ada kelompok kecil warga yang selalu aktif, sementara sebagian besar cenderung pasif. Jadi yang kerja bakti itu-itu saja orangnya. Kadang ada warga yang merasa urusan lingkungan ini tanggung jawab pemerintah. Jadi mereka enggan turun langsung, padahal dampaknya juga mereka yang rasakan.”

Namun, disisi lain partisipasi tersebut belum berlangsung secara merata. Kehadiran warga hanya berkisar 15 sampai 20 orang per RT/RW dan cenderung didominasi oleh kelompok kecil yang aktif. Sementara sebagian besar warga menunjukkan sikap pasif dengan berbagai alasan, mulai dari kesibukan bekerja hingga kurangnya kepedulian. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan peran dalam masyarakat, dimana beban gotong royong lebih banyak ditanggung oleh individu atau kelompok tertentu saja.

“..Saya memang berniat ikut, tapi sering sekali waktunya tidak cocok dengan jadwal kerja saya. Jadi meskipun ada keinginan, saya tidak bisa hadir. Kalau hari Minggu biasanya saya gunakan untuk tambahan kerja atau berdagang, jadi kadang berbenturan dengan jadwal kerja bakti. Jujur, saya ingin ikut membantu. Tapi pekerjaan saya tidak mengenal libur. Kalau pas ada kerja bakti, saya sering sudah terikat dengan urusan kantor atau pelanggan. Saya pernah ikut sekali, tapi setelah itu jarang bisa karena pekerjaan saya lebih sering menuntut waktu di hari libur. Jadi ya, tidak selalu bisa hadir. Kalau waktunya pas, saya sebenarnya mau ikut. Sayangnya, jam kerja saya sering tidak fleksibel.”

Berdasarkan hasil wawancara, Masyarakat di Kelurahan Leato Utara menunjukkan bahwa bentuk partisipasi dalam pengelolaan lingkungan terutama terwujud melalui gotong royong warga terlibat langsung dalam kerja bakti membersihkan selokan, memperbaiki drainase, dan mengumpulkan sampah, terutama ketika situasi mendesak seperti banjir atau penumpukan sampah. Namun, kehadiran aktif secara konsisten hanya sekitar 15–20 orang per RT/RW, yang menunjukkan bahwa gotong royong cenderung dilakukan oleh kelompok kecil warga yang peduli dan memiliki waktu luang, sedangkan sebagian besar cenderung pasif karena kesibukan pekerjaan, prioritas ekonomi, atau persepsi bahwa urusan kebersihan adalah tugas pemerintah. Ketidakmerataan ini memperlihatkan bahwa bentuk solidaritas dan tanggung jawab kolektif belum mengakar secara menyeluruh di seluruh lapisan masyarakat.

Fenomena ini selaras dengan temuan penelitian kasus lain di Indonesia, misalnya pada masyarakat Desa Penggalangan di mana penurunan partisipasi gotong-royong diidentifikasi sebagai akibat dari meningkatnya individualisme dan orientasi pada kepentingan pribadi dibanding kolektif (Dewi, 2024). Dalam kerangka Teori Struktural Fungsional, masyarakat dipandang sebagai sistem sosial dimana setiap anggota memiliki fungsi tertentu untuk menjaga kestabilan sosial dan lingkungan. Ketika sebagian warga tidak menjalankan perannya yakni ikut serta dalam gotong royong maka terjadi disfungsi sosial: sistem solidaritas melemah, pengelolaan lingkungan tidak optimal, dan kebersihan komunitas sulit terjaga. Untuk memperkuat fungsi sosial ini, dibutuhkan intervensi yang mendukung: peningkatan kesadaran kolektif, pengorganisasian yang lebih sistematis, serta dukungan institusional agar partisipasi tidak lagi tergantung situasional tetapi melekat sebagai norma bersama (Nurhartini, 2019).

2. Partisipasi dalam Bentuk Pikiran (Ide dan Masukan)

Masyarakat juga terlibat dalam memberikan ide dan masukan, meskipun intensitasnya relatif lebih rendah dibanding tenaga. Masukan biasanya disampaikan dalam forum musyawarah RT, rapat kelurahan, atau melalui tokoh masyarakat.

“Warga sering mengusulkan agar disediakan tempat sampah di tiap gang kecil. Mereka juga meminta agar jadwal pengangkutan sampah lebih rutin. Usulan seperti ini kamiampung dan teruskan ke pemerintah kota.”

Partisipasi masyarakat tidak hanya berbentuk tenaga fisik dalam kerja bakti, tetapi juga dalam bentuk partisipasi ide dan aspirasi yang diajukan melalui forum RT/RW maupun pertemuan dengan pemerintah. Sementara ibu Hijra Lalantu juga menyampaikan:

“Kami pernah usul ke kelurahan supaya ada pelatihan mengelola sampah plastik jadi kerajinan. Tapi sampai sekarang belum ada realisasinya.”

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Hijra Lalantu, Respon masyarakat yang menyampaikan usulan pelatihan pengelolaan sampah plastik menjadi kerajinan menunjukkan adanya kesadaran kolektif dan inisiatif warga untuk berpartisipasi tidak hanya dalam bentuk tenaga, tetapi juga melalui ide yang bersifat produktif dan berkelanjutan. Warga menyadari bahwa sampah plastik dapat memiliki nilai ekonomis jika diolah dengan tepat, sehingga aspirasi ini sekaligus mencerminkan upaya masyarakat dalam mencari solusi yang mengintegrasikan aspek lingkungan dan ekonomi keluarga.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk ide di Kelurahan Leato Utara tampak melalui berbagai usulan yang disampaikan dalam forum RT/RW maupun rapat kelurahan, seperti penyediaan tempat sampah di tiap gang

kecil, penyesuaian jadwal pengangkutan sampah, hingga permintaan pelatihan pengolahan sampah plastik menjadi kerajinan. Wawancara dengan warga yang menyatakan, “kami pernah usul ke kelurahan supaya ada pelatihan mengelola sampah plastik jadi kerajinan,” menunjukkan adanya kesadaran kolektif bahwa sampah plastik dapat bernilai ekonomis dan memberi manfaat tambahan bagi keluarga. Temuan ini selaras dengan pandangan Ratnasari dan Koestoer (2022) bahwa partisipasi ide masyarakat adalah indikator tumbuhnya kepedulian terhadap lingkungan yang tidak hanya berorientasi pada kegiatan fisik, tetapi juga pada gagasan yang bersifat produktif dan berkelanjutan. Hal ini menguatkan bahwa warga memiliki inisiatif dan kemampuan untuk memikirkan solusi berbasis komunitas, walaupun intensitasnya masih lebih rendah dibanding partisipasi tenaga.

Dalam perspektif teori Struktural Fungsional, partisipasi ide warga berperan sebagai bagian dari fungsi integratif masyarakat yang menjaga keseimbangan sosial melalui penyampaian aspirasi secara formal maupun informal. Ketika warga mengusulkan alternatif solusi pengelolaan sampah, mereka menjalankan fungsi sosial sebagai elemen sistem yang berkontribusi terhadap pemeliharaan pola (latent pattern maintenance) dan stabilitas lingkungan sosial, sebagaimana ditegaskan oleh Rahman et al. (2025) bahwa partisipasi intelektual komunitas merupakan modal penting dalam memperkuat sistem sosial desa. Namun, belum terealisasinya sejumlah usulan masyarakat seperti pelatihan daur ulang sampah plastik mencerminkan adanya disfungsi struktural, terutama pada elemen goal attainment, di mana struktur birokrasi belum mampu menindaklanjuti gagasan warga secara optimal (Ramadhanti, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat telah menjalankan perannya sebagai bagian dari sistem sosial, respons struktural yang belum konsisten menghambat terwujudnya keseimbangan dan efektivitas pengelolaan lingkungan di tingkat lokal.

3. Partisipasi dalam Pengawasan

Beberapa warga turut mengawasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan. Misalnya, menegur tetangga yang membuang sampah sembarangan atau melaporkan jika ada drainase tersumbat. Namun praktik pengawasan ini lebih bersifat informal dan personal. Ketua RT 01/RW 02 mengatakan :

“Kalau ada warga buang sampah sembarangan, biasanya tetangga langsung menegur. Tapi tidak semua berani, karena kadang bisa menimbulkan konflik kecil.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, sikap saling menegur di antara warga ketika melihat adanya perilaku yang merugikan lingkungan menunjukkan adanya bentuk kontrol sosial informal di masyarakat. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian warga memiliki kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, serta berusaha menegakkan norma-norma bersama agar lingkungan tetap terjaga. Namun demikian, bentuk partisipasi seperti ini masih menghadapi tantangan, terutama ketika teguran tersebut dapat menimbulkan ketegangan sosial atau konflik kecil antarwarga.

Kondisi ini menandakan bahwa partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan belum sepenuhnya didukung oleh kesadaran kolektif yang kuat, melainkan masih bersifat individual dan situasional. Hal ini juga tercermin dari pernyataan informan lain berikut.

“Saya pernah ingatkan anak-anak yang buang plastik di selokan, tapi mereka malah ketawa. Jadi memang butuh kesadaran kolektif, bukan hanya teguran pribadi.”

Wawancara menunjukkan bahwa warga kadang menegur tetangga yang membuang sampah sembarangan atau melaporkan drainase tersumbat, sebagai bentuk kontrol sosial informal untuk menjaga kebersihan lingkungan (Nurfadhillah & Rahmawati, 2023). Namun, praktik ini masih bersifat personal dan situasional, karena tidak semua berani menegur akibat takut menimbulkan konflik kecil. Kondisi ini menandakan bahwa kesadaran kolektif belum sepenuhnya terbentuk, sehingga partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan cenderung bergantung pada inisiatif individu.

Dalam perspektif teori struktural-fungsional, masyarakat merupakan sistem sosial dengan struktur dan fungsi yang saling mendukung untuk memelihara keseimbangan (Pratiwi, 2022). Teguran antarwarga dan laporan mengenai perilaku merugikan lingkungan berfungsi sebagai kontrol sosial informal yang menjaga stabilitas sistem sosial-lingkungan. Jika partisipasi kolektif tidak terinternalisasi, fungsi ini menjadi lemah, dan upaya menjaga lingkungan menjadi tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi warga perlu ditopang kesadaran kolektif agar sistem sosial dan ekologis dapat berfungsi dengan optimal.

Faktor Pendorong Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kelurahan Leato Utara tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor pendorong. Faktor-faktor ini bersumber dari internal masyarakat (nilai, kesadaran, kepentingan) maupun eksternal (dukungan pemerintah, tokoh masyarakat, sarana prasarana).

1. Kesadaran Kolektif akan Pentingnya Lingkungan

Kesadaran masyarakat bahwa kebersihan lingkungan berkaitan langsung dengan kualitas hidup menjadi faktor penting. Masyarakat menyadari bahwa sampah yang menumpuk menimbulkan bau, banjir, dan penyakit, sementara laut yang tercemar akan mengurangi hasil tangkapan ikan. Bapak Idris Hamsah mengatakan:

“Kalau laut kotor, kami yang paling rugi. Jadi menjaga kebersihan itu bukan hanya untuk pemerintah, tapi untuk kami juga.”

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesadaran ekologis yang cukup tinggi. Warga memahami secara langsung keterkaitan antara kondisi lingkungan dengan kehidupan dan penghidupan mereka, terutama bagi masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada laut. Hal ini mencerminkan adanya rasa memiliki (sense of ownership) terhadap lingkungan serta kesadaran bahwa tanggung jawab menjaga kebersihan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi juga merupakan kewajiban bersama. Lurah menegaskan hal yang sama:

“Masyarakat sudah tahu dampak buruk sampah. Itu membuat mereka lebih mudah diajak ikut kerja bakti.”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi mereka. Pemahaman mengenai konsekuensi negatif sampah, seperti banjir, penyakit, atau lingkungan yang tidak sehat, menjadi faktor pendorong yang efektif dalam memotivasi warga untuk terlibat aktif dalam kegiatan kerja bakti.

Masyarakat pesisir yang diwawancarai menunjukkan kesadaran ekologis yang kuat: mereka memahami bahwa tumpukan sampah menyebabkan bau, penyakit, banjir, sekaligus merusak laut yang berdampak pada hasil tangkapan ikan. Pernyataan seperti “kalau laut kotor, kami yang paling rugi” menunjukkan warga memiliki “sense of ownership” terhadap lingkungan, serta menyadari tanggung jawab menjaga kebersihan bukan hanya milik pemerintah, tetapi milik bersama. Hal ini sejalan dengan penelitian Hendayani et al. (2025) yang menunjukkan bahwa attachment komunitas dan kesadaran ekologis berpengaruh signifikan terhadap perilaku pengelolaan sampah di masyarakat pesisir. Pemahaman ini juga memengaruhi partisipasi masyarakat dalam kerja bakti, di mana pengetahuan tentang dampak negatif sampah mendorong keterlibatan aktif warga (Salam, Awaluddin, & Nurfatimah, 2025).

Dari perspektif teori Struktural-Fungsional, kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi sosial tanggung jawab kolektif dalam struktur masyarakat mendukung stabilitas sistem sosial: lingkungan bersih meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan ekonomi komunitas. Struktural-Fungsional menekankan peran norma dan integrasi sosial untuk menjaga keseimbangan sistem, sehingga keterlibatan masyarakat dalam kerja bakti adalah manifestasi dari fungsi sosial tersebut. Kata lain, efektivitas pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kebijakan atau fasilitas pemerintah, tetapi juga pada partisipasi warga sebagai bagian integral dari struktur sosial. Studi terkini mendukung hal ini, bahwa program kebersihan lingkungan lebih berhasil ketika masyarakat memahami konsekuensi ekologis dan memiliki rasa memiliki terhadap lingkungan (Fidayanti, 2025).

2. Budaya Gotong Royong

Gotong royong atau molohulo masih menjadi tradisi masyarakat Gorontalo. Tradisi ini mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan lingkungan tanpa perlu imbalan. Lurah menyampaikan:

“Kalau ada kerja bakti, warga biasanya langsung turun tangan. Budaya gotong royong masih hidup di sini.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di lingkungan masyarakat masih terjaga dengan baik. Gotong royong sebagai nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun masih menjadi dasar dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Partisipasi aktif warga dalam kegiatan kerja bakti mencerminkan adanya rasa tanggung jawab bersama terhadap kondisi lingkungan sekitar.

Melalui kegiatan ini, tidak hanya tercipta lingkungan yang bersih dan tertata, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antarwarga. Hal ini menunjukkan bahwa solidaritas sosial masih menjadi kekuatan utama dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan di wilayah tersebut. Ibu Sriyanti juga menyampaikan :

“Kalau ada yang tidak ikut kerja bakti, rasanya malu sendiri. Jadi gotong royong itu jadi semacam kewajiban moral.”

Tradisi gotong royong atau *molohulo* masih kuat, terlihat dari respons spontan warga saat kerja bakti tanpa mengharapkan imbalan. Lurah menegaskan bahwa masyarakat langsung turun tangan, sementara Ibu Sriyanti menambahkan bahwa tidak ikut kerja bakti menimbulkan rasa malu, sehingga kewajiban moral ini menegaskan internalisasi nilai sosial yang kuat. Fenomena ini sejalan dengan teori struktural-fungsional Talcott Parsons, di mana praktik gotong royong berperan dalam empat fungsi utama AGIL: adaptasi terhadap lingkungan, pencapaian tujuan kolektif, integrasi sosial antarwarga, dan pemeliharaan nilai (Agustin & Warsono, 2021). Partisipasi aktif warga tidak hanya menciptakan lingkungan bersih dan tertata, tetapi juga memperkuat kohesi sosial, menegaskan bahwa norma tradisional tetap relevan dalam mengatur perilaku sosial dan melestarikan budaya.

Hasil wawancara ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyoroati peran gotong royong dalam pemberdayaan masyarakat. Studi di Desa Punggur Kapuas menunjukkan bahwa budaya gotong royong tidak hanya menjaga solidaritas antarwarga, tetapi juga menjadi mekanisme sosial yang mendukung pelestarian lingkungan dan pembangunan komunitas berkelanjutan (Oktarika & Permadi, 2023). Dengan kata lain, tradisi ini tetap menjadi pilar utama integrasi sosial, memfasilitasi interaksi kolektif, dan membentuk rasa tanggung jawab bersama terhadap lingkungan. Kombinasi antara wawasan lapangan dan kerangka teori struktural-fungsional memperkuat kesimpulan bahwa gotong royong adalah fondasi sosial yang krusial bagi kelangsungan nilai dan fungsi komunitas.

3. Dukungan Pemerintah

Pemerintah kelurahan berperan dalam memfasilitasi kegiatan kebersihan, menyediakan perlengkapan sederhana, serta mengkoordinasikan pengangkutan sampah. Kehadiran lurah atau perangkat kelurahan dalam kegiatan seringkali meningkatkan semangat warga. Dukungan pemerintah termasuk faktor struktural yang memperkuat partisipasi. Hal ini sesuai dengan konsep *enabling environment* dalam pembangunan partisipatif. Lurah menuturkan:

“Kalau kami hadir langsung di lapangan, warga biasanya lebih bersemangat. Mereka merasa diperhatikan.”

Dari hasil wawancara tersebut, Lurah menuturkan bahwa kehadiran langsung pihak pemerintah di lapangan dapat meningkatkan motivasi dan semangat partisipasi warga dalam kegiatan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan bentuk dukungan yang nyata, bukan hanya arahan atau himbuan. Ketika pemerintah menunjukkan kepedulian dan keterlibatan langsung, warga merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk berkontribusi, sehingga tercipta hubungan timbal balik yang positif antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Ketua RW 01 menambahkan:

“Kalau kelurahan bantu alat, seperti cangkul atau gerobak sampah, warga lebih mudah bergerak.”

Pada kasus di kelurahan tempat wawancara dilakukan, kehadiran lurah atau perangkat kelurahan secara fisik dalam kegiatan kebersihan serta penyediaan sarana sederhana seperti cangkul dan gerobak sampah membantu meringankan beban warga sekaligus memfasilitasi partisipasi mereka dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini sesuai dengan temuan Kartini dan Zulkarnaini (2025) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat menunjukkan efektivitas tertinggi ketika didukung oleh kepemimpinan lokal yang kuat serta dukungan berupa kebijakan dan infrastruktur yang memadai. Selain itu, studi berbasis *Participatory Action Research* di Desa Jatirejo menunjukkan bahwa ketika perangkat desa dan masyarakat bekerja bersama dalam identifikasi masalah dan pelaksanaan aksi nyata, terjadi peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku positif dalam pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan. Hal ini selaras dengan wawancara, di mana kehadiran langsung lurah dan penyediaan alat kerja nyata membuat warga lebih termotivasi untuk berkontribusi aktif dalam kegiatan lingkungan.

Dari perspektif teori struktural-fungsional, lurah dan perangkat kelurahan berperan sebagai struktur formal yang memiliki fungsi integratif dalam menjaga keteraturan sosial dan mendorong partisipasi warga. Pemerintah melalui kelurahan menyediakan “infrastruktur sosial” berupa sarana, koordinasi, dan legitimasi

sehingga warga dapat berpartisipasi secara efektif, memenuhi kebutuhan kolektif akan kebersihan dan kesehatan lingkungan, serta memperkuat rasa saling percaya antara aparat dan masyarakat (Agus et al., 2021). Ketika lurah menjalankan fungsi instruktif, partisipatif, delegatif, dan pengendalian, pelaksanaan kebersihan lingkungan berjalan lebih efektif dan warga terdorong untuk aktif. Dengan demikian, wawancara ini memperlihatkan bagaimana keterlibatan proaktif pemerintah lokal berfungsi untuk menguatkan integrasi sosial dan partisipasi masyarakat sesuai logika struktural-fungsional.

Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat di Kelurahan Leato Utara dalam pengelolaan lingkungan hidup masih menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan ini tidak hanya berasal dari kondisi internal masyarakat (kesadaran, ekonomi, perilaku), tetapi juga dari faktor eksternal (keterbatasan sarana, kebijakan, dan dukungan kelembagaan).

1. Rendahnya Kesadaran Individu

Meskipun kesadaran kolektif sudah ada, namun pada tingkat individu masih banyak yang kurang peduli. Sebagian warga masih membuang sampah sembarangan, terutama ke selokan atau pesisir pantai. Ketua RT menuturkan:

“Ada warga yang kalau ditegur marah. Katanya lebih gampang buang sampah ke selokan daripada simpan di rumah. Jadi masih ada yang sulit diubah perilakunya.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat warga yang memiliki kesadaran lingkungan rendah dan menunjukkan resistensi terhadap ajakan perubahan perilaku. Respons negatif seperti marah saat ditegur menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum memahami dampak jangka panjang dari tindakan membuang sampah sembarangan. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya penyadaran dan penegakan disiplin lingkungan masih menghadapi tantangan sosial, terutama dalam mengubah kebiasaan yang sudah mengakar. Diperlukan pendekatan yang lebih persuasif dan berkelanjutan agar masyarakat mau berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Wawancara selanjutnya juga menggambarkan perilaku serupa dari warga lain yang membuang sampah di waktu tertentu agar tidak terlihat, namun tetap menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Ibu Hasran Suleman mengakui:

“Kadang tetangga saya buang sampah malam-malam ke selokan. Jadi kalau hujan, air mampet dan banjir. Tapi kalau diingatkan, malah tersinggung.”

Berdasarkan hasil wawancara meskipun ada semangat kolektif terhadap kebersihan, wawancara menunjukkan bahwa pada tingkat individu masih terdapat warga yang ragu atau bahkan menolak untuk mengubah kebiasaan membuang sampah sembarangan misalnya membuang ke selokan atau pesisir, bahkan membuang malam-malam agar tak terlihat. Hal ini sejalan dengan penelitian survei di Kelurahan Binjai, di mana ditemukan bahwa “perilaku masyarakat tentang kebersihan lingkungan belum sepenuhnya baik karena masih ada warga yang tidak membuang sampah pada tempatnya” (Jayanti et al 2022). Selain itu, penelitian kuantitatif di Palembang menunjukkan bahwa karakteristik seperti usia, pendidikan, dan faktor predisposisi berkontribusi pada rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah sembarangan (Ananda & Kurnisar, 2024), menunjukkan bahwa resistensi individu bukan sesuatu yang jarang ditemui. Karena itu, hasil wawancara Anda mencerminkan salah satu tantangan utama dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat: kesadaran kolektif saja belum cukup tanpa pemahaman dan komitmen individu.

Dari perspektif teori struktural-fungsional, fenomena ini menunjukkan bahwa struktur sosial formal seperti peran perangkat kelurahan, sistem pengelolaan, dan regulasi lingkungan harus dilengkapi oleh internalisasi norma sosial di tingkat individu agar fungsi pemeliharaan lingkungan dapat berjalan. Menurut kerangka struktural-fungsional, struktur institusional (pemerintah/kecamatan/kelurahan) menyediakan aturan, fasilitas, dan koordinasi; namun agar fungsi integratif tercapai yakni lingkungan bersih, kesehatan terjaga, dan harmoni sosial diperlukan partisipasi aktif tiap anggota masyarakat. Kasus warga yang membuang sampah sembarangan sekalipun telah ada himbauan, menunjukkan bahwa fungsi regulatif dan moral belum efektif tanpa internalisasi norma (Salsabila et al 2023). Oleh karena itu, intervensi tidak hanya pada penyediaan fasilitas atau kebijakan, tetapi juga pada pendidikan, sosialisasi, dan pendekatan persuasif yang mampu mengubah sikap serta kebiasaan individu agar mendukung tujuan bersama.

2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Minimnya fasilitas menjadi alasan utama mengapa partisipasi tidak maksimal. Tempat sampah umum hanya tersedia di titik-titik tertentu, sementara armada pengangkut sampah jarang masuk. Ketua RW menyampaikan:

“Kalau tong sampah hanya ada di jalan besar, warga yang tinggal di gang kecil pasti malas jalan jauh hanya untuk buang sampah.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Ketua RW menyoroti kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang merata, terutama bagi warga yang tinggal di gang sempit atau jauh dari akses utama. Kondisi ini menyebabkan sebagian warga menjadi enggan untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa faktor ketersediaan sarana dan kemudahan akses berpengaruh besar terhadap perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas yang memadai dan mudah dijangkau menjadi hal penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Selanjutnya, Bapak Abdul Malik menambahkan pandangannya mengenai persoalan penanganan sampah yang tidak segera diangkut oleh petugas, yang turut memperburuk kondisi lingkungan.

“Kalau sampah lama tidak diangkut, akhirnya menumpuk. Ada juga yang terpaksa dibakar, padahal asapnya mengganggu.”

Keterbatasan sarana ini termasuk hambatan struktural. Dalam konsep enabling environment, tanpa dukungan fasilitas yang memadai, partisipasi masyarakat cenderung menurun. Minimnya fasilitas pengelolaan sampah seperti tempat sampah umum yang hanya tersedia di jalan besar, dan armada pengangkut sampah yang jarang masuk ke gang-gang sempit menjadi hambatan struktural utama terhadap partisipasi warga. Seperti disampaikan Ketua RW: warga yang tinggal di gang kecil malas berjalan jauh hanya untuk membuang sampah; dan jika sampah tidak segera diangkut, tumpukan sampah bisa memancing tindakan membakar, yang berdampak negatif pada lingkungan. Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa ketersediaan sarana dan kemudahan akses sangat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan (Zulfikar *et al* 2025). Penelitian di berbagai lokasi mendukung hal ini: misalnya, di Desa Pampangan, keterbatasan petugas kebersihan dan fasilitas pembuangan sampah (tempat pembuangan sementara) dikaitkan dengan rendahnya perilaku membuang sampah pada tempatnya banyak warga membuang sampah ke bantaran sungai. Begitu pula di Desa Rantau Badak Lamo, upaya penyediaan tempat sampah dan edukasi kebersihan secara nyata terbukti meningkatkan kesadaran dan mengurangi praktik pembuangan sampah sembarangan.

Dalam perspektif teori struktural-fungsional, struktur sosial formal dalam hal ini institusi kelurahan dan pemerintah daerah memiliki fungsi penting sebagai penyedia “infrastruktur sosial” yang memungkinkan partisipasi warga serta menjaga keteraturan dan kesehatan lingkungan. Ketika fasilitas (tempat sampah, sistem pengangkutan) dan akses dibangun secara memadai, serta ada koordinasi pengangkutan rutin, maka struktur ini memfasilitasi fungsi integratif: warga terdorong berpartisipasi, lingkungan terpelihara, dan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah lokal terjaga. Studi empiris menunjukkan bahwa ketika fasilitas memadai, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, hasil wawancara Anda mengilustrasikan betapa pentingnya peran struktural bukan sekadar himbauan atau kampanye dalam membentuk perilaku kolektif warga.

3. Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Aturan

Tidak adanya sanksi tegas bagi pelanggar membuat sebagian masyarakat tidak jera. Walaupun sudah ada kesepakatan di tingkat RT/RW, penerapan aturan sering kali longgar. Ketua RT mengungkapkan:

“Kami sudah buat aturan sederhana, misalnya denda bagi yang buang sampah sembarangan. Tapi prakteknya sulit ditegakkan, karena tidak ada dasar hukum kuat.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Ketua RT menjelaskan bahwa upaya pengendalian perilaku warga melalui peraturan lokal sudah dilakukan, seperti penerapan denda bagi pelanggar kebersihan. Namun, kebijakan tersebut tidak berjalan efektif karena minimnya dasar hukum dan dukungan penegakan aturan. Kondisi ini menggambarkan bahwa inisiatif masyarakat di tingkat lokal masih terbatas dampaknya tanpa dukungan regulasi yang jelas dan sistem pengawasan yang konsisten. Diperlukan sinergi antara kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat agar aturan yang dibuat dapat dijalankan secara tegas dan adil.

Ibu Hijra Lalantu juga menuturkan bahwa ketiadaan sanksi yang tegas berdampak pada menurunnya kepatuhan masyarakat dan menimbulkan rasa tidak adil bagi warga yang sudah disiplin. Berikut kutipan wawancaranya :

“Kalau tidak ada sanksi, ya orang seenaknya saja. Akhirnya yang patuh merasa percuma.”

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan aturan lingkungan membutuhkan keseimbangan antara kesadaran dan sanksi yang tegas. Tanpa adanya konsekuensi bagi pelanggar, masyarakat cenderung mengabaikan aturan, sementara warga yang taat merasa upayanya tidak dihargai. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan sistem sanksi yang jelas dan adil untuk menciptakan kedisiplinan kolektif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Meskipun sudah ada kesepakatan mengenai kebersihan lingkungan dan penerapan denda bagi pelanggar, aturan tersebut sulit ditegakkan karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan dukungan pengawasan terbatas (Jadda, Mansur, & Hidayat, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan tidak cukup hanya mengandalkan kesepakatan lokal, melainkan membutuhkan regulasi yang jelas dan penegakan sanksi yang konsisten. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nurmalsyiah dan Suryani (2021) yang menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat meningkat signifikan ketika terdapat dukungan regulatif dan sanksi tegas bagi pelanggar. Dengan demikian, wawancara menunjukkan bahwa ketiadaan sanksi yang jelas dapat menurunkan kepatuhan warga dan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi mereka yang sudah disiplin, sehingga perlu adanya sistem sanksi yang adil dan konsisten.

Dari perspektif teori struktural-fungsional, regulasi lingkungan dan sanksi berperan sebagai struktur formal yang mengatur perilaku kolektif dan menjaga keteraturan sosial (Puspita, Rachmawati, & Sampurna, 2022). Struktur formal ini, berupa aturan, denda, dan mekanisme pengawasan, memiliki fungsi integratif: mendorong kepatuhan warga, membangun kepercayaan sosial, serta memastikan partisipasi masyarakat tidak hanya sukarela tetapi menjadi kewajiban bersama (Usman & Can, 2020). Studi terkait di Kota Parepare menegaskan bahwa implementasi sanksi yang konsisten dan didukung aparat pemerintah meningkatkan kedisiplinan warga dalam pengelolaan sampah (Jadda, Mansur, & Hidayat, 2023). Berdasarkan wawancara, jelas terlihat bahwa tanpa sanksi tegas, upaya warga yang patuh terasa sia-sia, sehingga keberhasilan pengelolaan lingkungan sangat bergantung pada sinergi antara kesadaran masyarakat dan regulasi formal yang diterapkan secara konsisten.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kelurahan Leato Utara, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan warga pada kegiatan kebersihan lingkungan umumnya terlihat dalam bentuk tenaga, khususnya saat kerja bakti membersihkan selokan, jalan lingkungan, dan pesisir pantai. Partisipasi tersebut cenderung meningkat ketika muncul persoalan mendesak, seperti ancaman banjir atau penumpukan sampah, meskipun jumlah warga yang hadir masih terbatas. Partisipasi dalam bentuk ide juga muncul melalui forum musyawarah, di mana masyarakat mengusulkan penyediaan fasilitas kebersihan, pengaturan jadwal pengangkutan sampah, hingga pelatihan daur ulang. Temuan ini menunjukkan bahwa kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga lingkungan telah tumbuh, meskipun belum sepenuhnya diikuti dengan realisasi dan keterlibatan yang merata. Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh dorongan kesadaran bahwa kondisi lingkungan yang bersih memberikan manfaat langsung bagi kehidupan sehari-hari. Namun, keterlibatan ini juga terhambat oleh kesibukan pekerjaan, rendahnya kepedulian sebagian warga, serta pandangan bahwa pengelolaan lingkungan merupakan tugas pemerintah. Hambatan tersebut menyebabkan aktivitas pengelolaan lingkungan sering hanya dijalankan oleh kelompok kecil warga yang konsisten aktif. Temuan penelitian ini membuka peluang penerapan program pemberdayaan yang lebih terstruktur, peningkatan dukungan pemerintah dalam menindaklanjuti aspirasi warga, serta penguatan edukasi lingkungan untuk memperluas partisipasi. Penelitian selanjutnya dapat menelaah strategi yang lebih efektif dalam membangun komitmen kolektif serta mekanisme kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat demi pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Referensi

1. Agus, D. S., Rares, J., & Kiyai, B. (2021). Partisipasi masyarakat dalam penanganan kebersihan sungai di Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting, Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(106).
2. Agustini, D., & Warsono, W. (2021). Budaya Gotong Royong Pada Pemuda Dalam Masyarakat Multi Agama Di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan: Budaya Gotong Royong Pada Pemuda Dalam Masyarakat Multi Agama. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 10(1), 145–163. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraan/article/view/42039>
3. Ananda, D., & Kurnisar. (2024). Studi kuantitatif tentang determinan kesadaran masyarakat dalam membuang sampah sembarangan. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*. Jayanti, U. N. A. D., Ginting, F. F., & Anggara, R. B. (2022). Analisis kesadaran masyarakat terhadap peduli lingkungan di Kecamatan Medan Denai Kelurahan Binjai. *Pedagogi: Jurnal Ilmiah Pendidikan*.
4. Salsabila, L., Lodan, K. T., & Khairina, E. (2023). Public engagement impact on sustainable waste management in Indonesia: Examining public behavior. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(2), 158–178.
4. Demmanggasa, Y. (2025). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan : Studi Perbandingan di Lingkungan Pedesaan Yultan. *Cahaya Mandalika*, 738.
5. Dewi, F. F., Daulay, M. P., Ramadani, P., Nurhadijah, S., Lubis, L. N., & Ali, M. R. (2024). Analisis partisipasi masyarakat terhadap kegiatan gotong-royong di Desa Penggalangan. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 55–68. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i4.20208>
6. Nurhartini. (2019). Partisipasi masyarakat melaksanakan gotong royong di Desa Sepala Dalung. *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7(1), 196–206.
6. Gunawan, S. (2020). Dampak Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Ditimbulkan Dari Pencemaran Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Humaniora Dan Bisnis. Participation In Tourism Village Program : A Case Study Of Timusu Village*. 4(2), 92–106.
7. Hendayani, H. T., Kurniasih, P. D., Rahmawati, Y., Ilham, M. A., Andika, M. T., & Mubarak, R. (2025). Membangun kesadaran masyarakat pesisir terhadap kebersihan lingkungan di Desa Kuala Simbur, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. *Journal of Rural Community Development*. <https://doi.org/10.22437/jrcd.v2i2.34>
8. Jadda, A. A. T., Mansur, S., & Hidayat, A. (2023). Efektivitas penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup akibat sampah di Kota Parepare. *Madani Legal Review*.
9. Kartini, R., & Zulkarnaini. (2025). Analisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat dalam perspektif administrasi publik. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 8(12), 71–80.
10. Lestari, R. (2020). Dinamika sistem sosial dalam pengelolaan lingkungan berbasis komunitas. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 6(1), 45–58. <https://doi.org/10.33369/jsn.6.1.45-58>
11. Marhayati, N. (2019). Peran kepemimpinan lokal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada program kebersihan lingkungan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 45(2), 112–123. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v45i2.789>
12. Maryani, E., & Darmawan, D. (2017). Faktor lingkungan dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. *Jurnal Geografi Gea*, 17(2), 179–188. <https://doi.org/10.17509/gea.v17i2.9193>
13. Ngareng, A. A., Sintia, B., & Banteng, D. (2024). Mengidentifikasi Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah di Kota Gorontalo. 2(01), 41–45.
14. Nizar, M., Putra, A., Zahrani, N. A., Zahra, T. A., Bella, B. C., Hariyadi, A. G., Fadhila, D. S., Akrom, S., Abiyu, A., Rini, R., & Firdausi, K. (2025). Sampah Plastik sebagai Ancaman terhadap Lingkungan. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*, 2.
15. Nurfadhillah, A., & Rahmawati, R. (2023). Analisis ketidakefektifan pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor melalui lensa teori struktural-fungsionalisme. *Administratie: Jurnal Administrasi Publik*.
16. Nurmalasyiah, N., & Suryani, L. (2021). Pengaruh implementasi kebijakan pengelolaan sampah terhadap partisipasi masyarakat dan efektivitas pengelolaan sampah di Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*.
17. Oktarika, D., & Permadi, M. A. (2023). Analisis Peran Budaya Gotong Royong dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Pungur Kapuas Kabupaten Kubu Raya. *Juwara: Jurnal Wawasan dan Aksara*, 3(2), 78–87. <https://jurnal.smpharapanananda.sch.id/index.php/juwara/article/view/70>
18. Pratiwi, S. A. (2022). Pengelolaan sampah dan partisipasi masyarakat terhadap sampah rumah tangga di RW 06 percontohan pengurangan sampah, Kelurahan Kebon Kosong, Jakarta Pusat. *Geomedia Majalah Ilmiah dan Informasi Kegeografian*, 20(1), 42–51.
19. Puspita, K. A., Rachmawati, I., & Sampurna, H. (2022). Pengaruh implementasi kebijakan pengelolaan sampah terhadap partisipasi masyarakat di Kota Sukabumi. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*.
20. Rahman, A., Syukur, M., & Rifal, R. (2025). Pelestarian lingkungan melalui partisipasi petani dalam pembentukan ruang publik di Desa Bulutellue. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 7(1). <https://doi.org/10.31571/sosial.v7i1.1648>
21. Ramadhanti, A. F. (2023). Partisipasi masyarakat dalam mengelola Curug Cigentis sebagai destinasi pariwisata melalui community based tourism. *Universitas Pendidikan Indonesia*.
22. Ratnasari, S., & Koestoer, R. H. (2022). Partisipasi komunitas masyarakat lokal pada program lingkungan hidup di Indonesia. *Sosio Informa*, 8(1). <https://doi.org/10.31595/inf.v8i1.2971>
23. Rosa, M. K. A., Rodiah, Y., & Kurniawan, A. (2022). Edukasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Sawah Lebar Baru Kota Bengkulu. *Abdi Reksa*, 3(1), 52–58. www.ejournal.unib.ac.id/index.php/abdireksa
24. Salam, R. D., Awaluddin, I., & Nurfatimah, N. (2025). Tingkat partisipasi, kesadaran masyarakat dan arahan konsep pengelolaan sampah rumah tangga untuk kualitas lingkungan berkelanjutan. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi*, 9(1). <https://doi.org/10.29408/geodika.v9i1.27808>
25. Setyaningsih, M., & Maesaroh. (2021). Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dalam Upaya Mencegah Bencana dan Melestarikan Lingkungan di Desa Karangreja. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(5), 2879–2887. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/5326%0>
26. Sugiyono. (2018). *Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan (kuantitatif, kualitatif, kombinasi, R&D dan penelitian pendidikan)*. Alfabeta.

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.5538>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

27. Taurista, H., & Choiriyah, I. U. (2024). Community Participation in Development Planning is Driven by Leadership, Communication, and Education. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*.
28. Usman, S., & Can, L. R. (2020). Kebijakan pengelolaan sampah: Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate. *Jurnal Sains Sosial dan Humaniora*.
29. Yasril, Y., & Nur, A. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Lingkungan. *Jurnal Dakwah Risalah*, 28(1), 1. <https://doi.org/10.24014/jdr.v28i1.5538>
30. Zulfikar, Z., Muzaffar, M., & Arianti, E. (2025). Hubungan pengetahuan dan ketersediaan fasilitas tempat sampah dengan perilaku membuang sampah pada masyarakat Desa Singah Mulo, Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Kesehatan Saemakers PERDANA*.